

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Gelombang reformasi yang mengalir membawa bangsa Indonesia untuk memasuki babak baru dalam segala bidang. Bangsa Indonesia sedang mengalami masa transisi untuk menuju masyarakat yang demokratis, maju dan mandiri. Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Era reformasi yang sedang berjalan saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang pembangunan dan pemerintahan.

Salah satu perubahan yang terjadi adalah penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mengisyaratkan diberlakukannya otonomi daerah. Dengan diadakannya otonomi daerah maka akan terjadi desentralisasi wewenang dan desentralisasi keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

yakni Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan semakin berkembangnya keadaan, ketatanegaraan, dan adanya tuntutan dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, maka proses penyelenggaraan pemerintah daerah pada era otonomi akan lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan agar dapat mengoptimalkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dalam pelaksanaannya otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di daerah masing-masing. Cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangga sendiri, akan tetapi tetap berada pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah atau pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. Dan di dalam

pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan terdapat pertanggungjawaban terhadap masyarakat dengan demikian, maka akan terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk secara langsung membangun kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta di daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari otonomi daerah maka diperlukan peran antara masyarakat dan pihak swasta dalam mencapai pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memotivasi agar pembangunan daerah lebih kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan inovasi dari masyarakat yang pada akhirnya akan mampu bersaing dengan daerah lain. Pemberdayaan masyarakat dan swasta dilakukan untuk mengetahui serta dapat memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki oleh daerah, yang berkaitan dengan proses pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional diarahkan untuk menyeimbangkan daerah dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa dan antar sektor. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras, dan saling menunjang antara satu bidang pembangunan terutama ditunjukkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat (Lincoln Arsyad, 1988 : 16).

Pembangunan selalu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan. Paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga

pembangunan dikatakan berhasil bila pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah relatif tinggi. Namun dewasa ini, definisi pembangunan yang paling banyak diterima adalah pembangunan merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah "garis kemiskinan absolut" tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier, 1995 : 7).

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah atau pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. Dan didalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan terdapat pertanggung jawaban terhadap masyarakat. Dengan begitu, terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta di daerah yang bersangkutan.

Penetapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah, mempunyai dampak yang sangat luas dan memunculkan permasalahan baru dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Baik di daerah yang sudah maju maupun di daerah yang relatif masih terbelakang dituntut untuk meningkatkan kinerja pembangunan di daerahnya berdasarkan potensi yang dimiliki, sehingga setiap daerah harus mampu mengoptimalkan outputnya guna meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya (Hari Murti, 2002:16).

Pemerintah daerah yang telah diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya harus berusaha memenuhi segala kebutuhan rumah tangga daerah

tanna memberikan beban kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mengetahui sektor-sektor ekonomi potensial yang dimiliki oleh daerahnya, yang kemudian dikembangkan secara optimal. Sehingga nantinya akan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Kondisi geografis di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya begitu pula dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak sama, yang menyebabkan tingkat kemampuan berkembang masing-masing daerah berbeda. Menurut Arsvad (1999) perbedaan kondisi daerah membawa implikasi terhadap pola pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dalam pembangunannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional namun disesuaikan dengan potensi dan permasalahan pembangunan di daerahnya. Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah aglomerasi dari wilayah kota Yogyakarta dikarenakan kondisi geografisnya yang strategis untuk menialankan pembangunan ekonomi dengan baik serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Dari tahun ke tahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman meningkat. Pada tahun 2006 nilainya mencapai Rp. 53.092,19 juta dengan tingkat pertumbuhan mencapai 4,31 persen. Hal tersebut mengisyaratkan

bahwa pembangunan di Kabupaten Sleman mengalami kemajuan dan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan PDRB sebesar Rp. 50.805,76 juta.

PDRB merupakan indikator ekonomi yang utama untuk mengukur sejauh mana suatu daerah melakukan pembangunan. PDRB meliputi beberapa sektor atau kegiatan ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan & penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, & air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, restoran&hotel, sektor angkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan, & jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto yang disajikan dengan harga konstan akan bisa menggambarkan tingkat perubahan ekonomi di daerah itu, dan apabila ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan produk perkapita. Jika PDRB dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan perkapita yang dapat digunakan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain.

Penyajian atas dasar harga konstan bersama-sama dengan harga yang berlaku antara lain dapat dipakai sebagai indikator untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Penyajian PDRB secara sektoral dapat memperlihatkan struktur ekonomi di wilayah itu. Bila angka PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja, atau jumlah input yang digunakan, akan dapat menggambarkan tingkat produktifitas secara sektoral maupun menyeluruh. dengan demikian PDRB berfungsi sebagai :

- Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi
- Indikator tingkat pertumbuhan income per kapita
- Indikator tingkat kemakmuran
- Indikator tingkat inflasi dan deflasi
- Indikator struktur perekonomian Indikator hubungan antar sektor

PDRB yang masih memuat faktor inflasi di dalamnya merupakan pendapatan PDRB atas dasar harga berlaku (at current prices), sedang bila faktor inflasi sudah dieliminasi akan merupakan PDRB atas dasar harga konstan (at constant prices).

Secara konseptual, nilai atas dasar harga konstan juga mencerminkan kuantum produksi tahun berjalan yang dinilai dengan harga pada tahun dasar. Dan secara metodologis suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan metode revaluasi, ekstrapolasi dan deflasi.

Mengingat, pelaksanaan otonomi daerah dengan pemberdayaan potensi ekonomi daerah akan bisa berjalan jika spesialisasi sektor ekonomi daerah dapat

dioptimalkan. Spesialisasi sektor ekonomi penting untuk diketahui guna menentukan skala prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk mengamati lebih lanjut mengenai **“ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001-2006”**.

B. BATASAN MASALAH

Penulis hanya membatasi pada analisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman dari tahun 2001-2006 dengan mengidentifikasi kondisi PDRB dari beberapa sektor ekonomi.

C. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kondisi PDRB Kabupaten Sleman berdasarkan analisis tipologi klassen?
- b. Sektor-sektor manakah yang menjadi sektor ekonomi basis di Kabupaten Sleman?
- c. Bagaimana gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman berdasarkan pada kondisi PDRB pada masing-masing sektor

D. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan tujuan yang akan diperoleh yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi PDRB Kabupaten Sleman berdasarkan analisis tipologi klassen?
- b. Untuk melihat sektor-sektor perekonomian manakah yang menjadi sektor ekonomi basis di Kabupaten Sleman?
- c. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman berdasarkan pada kondisi PDRB pada masing-masing sektor ekonomi?

E. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Sleman.

- b. Bagi peneliti

Sebagai bahan pertimbangan antara teori yang telah diterima pada saat perkuliahan dengan mengaplikasikan ilmu pada kondisi riil yang terjadi.

- c. Bagi instansi terkait

Bagi instansi terkait memberi masukan dan informasi dalam menyusun